

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Ketimpangan ekonomi di Indonesia telah meningkat selama tahun 2020. Dampak dari adanya krisis kesehatan akibat covid telah merambah pada munculnya potensi krisis meningkat. Hal tersebut terlihat dari ukuran ketimpangan berupa indeks gini yang mengalami peningkatan. Indeks gini telah meningkat Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,385. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380.

Gini Ratio perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,399, naik dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,393 dan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,391. Gini Ratio perdesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,319, naik dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,317 dan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,315.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,93%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2020 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,08% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk perdesaan,

angkanya tercatat sebesar 20,89% yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,385 dan meningkat 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,401, naik dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,399 dan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,393. Gini Ratio di perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,315, turun dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,319 dan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,317.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,76%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,81 % yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,68 %, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
- 2) Masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
- 3) Masih terdapat ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah ingin mengetahui apakah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2017 sampai tahun 2021. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi, rumusan masalah dan batasan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
- 3) Untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah ini yaitu sebagai berikut:

### **1) Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan perencanaan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

### **2) Bagi Peneliti**

Tambahan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah.

### **3) Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian lain diharapkan dapat dijadikan dukungan referensi untuk penelitian lanjutan pada ruang lingkup dan kajian yang sama

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian PDRB dan PDB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Sedangkan Produk domestik bruto (PDB) atas harga konstan adalah menggambarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dengan dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. PDB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak terpengaruh oleh faktor harga di suatu wilayah

### **2.1.2 Pengertian Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah**

Adanya perbedaan kemajuan antar daerah di jelaskan Myrdal dalam teorinya, Myrdal berpendapat pembangunan ekonomi proses sebab dan penyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan yang semakin banyak dan mereka yang tinggal di belakang akan menjadi semakin terhambat.

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (backwash effect) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effect) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Jhingan, 1990:8) .

Perbedaan kemajuan antar wilayah berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang sama dengan kesenjangan sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan, sehingga muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang dikotomis.

Dalam hal ini (Kuznet, 1995:9) mengemukakan suatu hipotesis yang di kenal dengan sebutan “ U Hypothesis”, hipotesa ini dihasilkan lewat kajian empiris terhadap pola pertumbuhan ekonomi terhadap trade off antara pertumbuhan dan pemerataan. Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi maka setelah mencapai tahap tertentu trade off tersebut akan menghilang diganti dengan hubungan kolerasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan yang disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan sektor tradisional. Berdasarkan tingkat kemajuannya wilayah-wilayah dalam suatu Negara dapat di kelompokkan sebagai berikut (Hanafiah, 1998:23) yaitu sebagai berikut :

- A) Wilayah terlalu maju terutama kota - kota besar dimana terdapat batas pertumbuhan atau polarisasi, umpamanya dalam menghadapi masalah diseconomies of scale yang menyebabkan masalah manajemen, kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya fasilitas pelayanan umum, kenaikan gaji dan upah, kenaikan harga bahan baku energi, peningkatan ongkos sosial.
- B) Wilayah netral di cirikan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, tidak ada kesesakan dan tekanan ongkos sosial dan merupakan kota satelit bagi wilayah yang terlalu padat.
- C) Wilayah sedang merupakan wilayah dengan ciri-ciri campuran pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik yang merupakan gambaran

kombinasi antara daerah maju dan kurang maju dimana terdapat juga pengangguran dan kelompok masyarakat miskin.

- D) Wilayah kurang berkembang atau kurang maju yang merupakan wilayah dan tidak ada tanda - tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan pembangunan nasional seperti daerah - daerah konsentrasi industri yang sudah mundur.
- E) Wilayah tidak berkembang merupakan wilayah tidak maju atau wilayah miskin dimana industri modern tidak pernah dapat berkembang dalam berbagai skala umumnya di tandai dengan daerah pertanian dengan usaha tani subsisten dan kecil, berpenduduk jarang dan tersebar dan tidak terdapat kota atau konsentrasi pemukiman yang relatif besar.

Kesenjangan regional oleh Murty dalam Abel (2006:25) diartikan sebagai ketidakseimbangan pertumbuhan antar sektor primer, sekunder, tersier atau sektor sosial di suatu negara, distrik, atau tempat dimana peristiwa itu terjadi. Di setiap negara apakah itu negara maju atau berkembang, negara pertanian atau industri, negara besar atau kecil, mempunyai wilayah yang maju dan tertinggal secara ekonomi adalah penting untuk menghubungkan pola pembangunan ekonomi regional dengan beragam variabel fisik dan sosial ekonomi untuk mengidentifikasi variabel mana yang mempunyai pengaruh terbanyak terhadap pola pertumbuhan. Meskipun kesenjangan tidak berlaku di semua wilayah dengan kekuatan (tingkatan) yang sama, tetap terdapat aspek-aspek umum yang dapat memberikan beberapa generalisasi. Adapun penyebab utama kesenjangan sebagai berikut :

a) Faktor Geografis

Apabila suatu wilayah yang sangat luas, distribusi dari sumberdaya nasional, sumber energi, sumberdaya pertanian, topografi, iklim dan curah hujan tidak akan merata. Apabila faktor-faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan menyebabkan suatu wilayah berkembang lebih baik.

b) Faktor Historis.

Tingkat pembangunan suatu masyarakat juga bergantung pada masa yang lalu untuk menyiapkan masa depan. Bentuk organisasi ekonomi yang hidup di masa lalu menjadi alasan penting yang dihubungkan dengan isu insentif, untuk pekerja dan pengusaha. Sistem feodal memberikan sangat sedikit insentif untuk bekerja keras. Sistem industri dimana pekerja merasa tereksplorasi, bekerja tanpa istirahat, suatu perencanaan dan sistem yang membatasi akan memberi sedikit insentif dan menyebabkan pembangunan terhambat.

c) Faktor Politik.

Ketidakstabilan politik dapat menjadi penghambat pembangunan yang sangat kuat. Selain itu, jika pemerintah stabil tapi lemah, korupsi dan ketidakmampuan untuk mengalahkan sikap mementingkan diri sendiri dan menolak tekanan atau kontrol sosial akan menggagalkan tujuan dari kebijakan pembangunan. Kondisi politik di setiap wilayah tidak sama.

d) Faktor Kebijakan Pemerintah

Belakangan ini, hampir semua negara kaya sedang diterapkan konsep negara kesejahteraan (*welfare of state*). Di negara tersebut, kebijakan pemerintah mulai diarahkan secara langsung pada pemerataan regional yang lebih besar. Kekuatan

pasar yang menghasilkan efek "backwash" dihilangkan, sementara yang menghasilkan efek menyebar didukung sementara di negara-negara miskin, kebijakan yang demikian masih sangat sedikit.

e) Faktor Administrasi (birokrasi)

Faktor administrasi yang efisien atau tidak efisien berpengaruh dalam menambah kesenjangan antar wilayah. Saat ini pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan administrator yang jujur, terdidik, terlatih dan efisien karena birokrasi yang efisien akan berhasil dalam pembangunan regional dan sebaliknya.

f) Faktor Sosial

Banyak faktor sosial yang menjadi penghalang dalam pembangunan. Penduduk di wilayah yang belum berkembang memiliki lembaga dan keinginan (attitude) yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Di lain pihak penduduk dari wilayah yang lebih maju memiliki kelembagaan dan keinginan yang kondusif untuk pembangunan.

g) Faktor Ekonomi

Penyebab secara ekonomis seperti perbedaan-perbedaan dalam faktor produksi, proses kumulatif dari berbagai faktor, siklus kemiskinan yang buruk, kekuatan pasar yang bebas dan efek "backwash" dan efek menyebar (spread) dan pasar tidak sempurna, berlangsung dan menambah kesenjangan dalam pembangunan ekonomi.

### **2.1.3 Pengertian Wilayah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif /aspek fungsional.

Ketika menelaah suatu daerah atas dasar persyaratan atau kriteria tertentu maka pada daerah tersebut akan muncul kesamaan tertentu pula. Kesamaan tersebut, dapat terbentuk dari unsur alam atau fisik, unsur manusia, maupun hasil interaksi keduanya, dan membentuk suatu wilayah yang dapat dibedakan dengan wilayah-wilayah lainnya yang memiliki ciri berbeda. Wilayah yang memiliki ciri khas tersebut dalam geografi disebut region. Wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah geografi atau region berdasarkan unsur fisik. Misalnya, wilayah geologi (geological region), wilayah jenis tanah (soil region), wilayah iklim (climatic region), dan wilayah vegetasi (vegetation region). Kita pun dapat membedakan wilayah berdasarkan unsur sosial budaya manusia seperti wilayah bahasa (linguistic region), wilayah ekonomi (economic region), wilayah sejarah (historical region), dan wilayah politik (political region) seperti halnya batas negara-negara di dunia.

Berdasarkan wilayah geologi (unsur fisik), di atas permukaan bumi akan ditemukan daerah patahan, lipatan, atau daerah yang terbentuk dari proses tektonisme sehingga mempunyai bentuk dan fenomena yang khas. Misalnya, fenomena pertambangan minyak bumi di Jambi. Fenomena ini menjadikan Jambi sebagai wilayah geologi yang berbeda dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan kekhasannya wilayah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

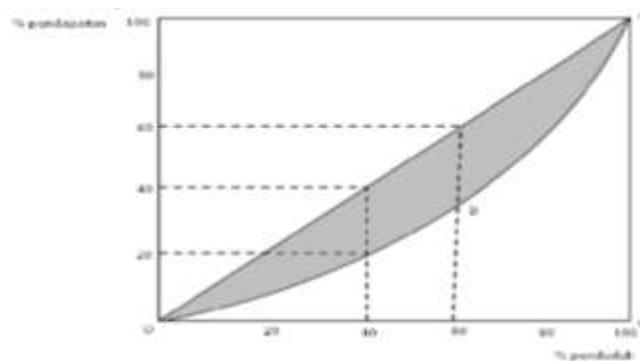
- A) Wilayah yang didasarkan atas konsep homogenitas disebut juga wilayah formal (homogeneous / uniform region)
- B) Wilayah yang didasarkan atas konsep heterogenitas disebut juga wilayah fungsional (nodal region / organic region)

### 2.1.4 Instrumen Ketimpangan Wilayah

Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah yaitu :

#### A) Kurva Lorenz (Lorenz Curve)

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya, satu tahun.



Gambar 2  
Kurva Lorenz

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi / bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.

## **B) Gini / Gini Ratio**

Gini index adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanyaberkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut Gini setiap kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang selanjutnya disebut angka Gini dengan cara membagi luas yang dibentuk kurva Lorenz tersebutdengan total pendapatan. Maksimum dan minimum nilai G adalah :  $0 \leq G \leq 1$ . Menurut Michael P Todaro jika angka Gini rasio berkisar antara 0,50 sampai 0,70 maka distribusi pendapatan dinyatakan sangat timpang. Apabila angka Gini Rasio berkisar antara 0,20 sampai dengan 0,35 maka distribusi pendapatan relatif sama ketimpangannya.

## **C) Regional Income Disparities**

Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat,akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah di dalam wilayah suatu negara. Jeffrey G. Williamson (1965:3) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju danyang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah - daerah tertentu.

Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Williamson menggunakan Williamson Index (Indeks Williamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas bahwa yang diperbandingkan adalah

tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok.

Formulasi Indeks Williamson secara statistik adalah sebagai berikut :

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}{n}}, 0 < IW < 1$$

**Keterangan :**

IW = Indeks Williamson

$Y_i$  = Pendapatan per kapita daerah i

$Y$  = Pendapatan per kapita rata - rata seluruh daerah

$f_i$  = Jumlah penduduk daerah i

$n$  = Jumlah penduduk seluruh daerah

Angka koefisien Indeks Williamson adalah  $0 < IW < 1$ . Jika Indeks Williamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau semakin merata dan sebaliknya angka yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Walaupun indeks ini memiliki kelemahan yaitu sensitive terhadap defenisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan artinya apabila ukuran wilayah yang digunakan berbeda maka akan berpengaruh terhadap hasil perhitungannya, namun cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

### **2.1.5. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan

masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup yaitu sebagai berikut :

- 1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- 2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- 3) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda - beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari

pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di bawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000 - 2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan di bawah Dolar Amerika Serikat (USD) \$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2 per hari, dg batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$2/hari." [1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. [1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan \$1 dolar / hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara - negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang - kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, Negara - negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang. Kemiskinan tidak bisa dipahami dengan menggunakan satu dimensi atau satu indikator saja. Kemiskinan sangat kompleks, sehingga diperlukan indikator atau ukuran yang multidimensi.

Indikator yang banyak digunakan adalah indikator global dengan menggunakan pendekatan moneter seperti garis kemiskinan yang digunakan oleh World Bank dengan batas USD 1.25 Purchasing Power Parity (PPP) atau melalui pendekatan konsumsi dasar (basic need) yang digunakan pula di Indonesia.[2] Sementara itu, pendekatan tersebut hanya melihat indikator pendapatan atau konsumsi yang dilakukan masyarakat dan menurut Sen (2000:3) dianggap belum menangkap akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya.

Untuk melihat persoalan kemiskinan secara holistik, dikembangkan IKM (Indeks Kemiskinan Multidimensi). Konsep tersebut pertama kali dikembangkan oleh Oxford Poverty and Human Initiative (OPHI) berkolaborasi dengan Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 2010. Tujuan utama dari dikembangkannya konsep tersebut adalah untuk memetakan indikator - indikator kemiskinan secara lebih komprehensif dan jelas. Hasilnya, ketika diadopsi di Indonesia, ada tiga indikator yang digunakan untuk memahami persoalan kemiskinan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup.[4] Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa pendekatan moneter dan konsumsi saja tidak cukup untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kemiskinan, diperlukan indikator - indikator lain seperti kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup.

### **2.1.6 Penyebab kemiskinan**

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan berbagai hal berikut :

- 1) Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.

- 2) Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
- 3) Penyebab sub - budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
- 4) Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
- 5) Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil - hasil penelitian terdahulu menyangkut judul yang diteliti penulis. Hal ini didasarkan untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan

referensi perbandingan dalam penelitian. Adapun penelitian - penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel II.1 berikut :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO.</b>	<b>Nama Peneliti / Judul Penelitian</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Ma'mun Musfidar Judul : Faktor - faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di sulawesi selatan tahun 2001 - 2010	Model Ekonometrika	<p>1. Hasil ini memberikan implikasi bahwa populasi jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yang berusia produktif baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja / tidak bekerja lebih banyak yang berada di pedesaan dibandingkan di perkotaan.</p> <p>2. Hasil ini memberikan implikasi bahwa di provinsi Sulawesi Selatan tingkat UMR yang ditetapkan oleh pemerintah cukup tinggi karena dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan.</p> <p>3. Hal ini memberikan implikasi bahwa kontribusi sektor industri di Provinsi Sulawesi Selatan baik dari industri migas maupun dari industri bukan migas dapat meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan.</p>
2.	Sultan, Jamzani Sodik , Judul : Kerimpangan pendapatan regional di DIY- Jawa Tengah serta faktor faktor yang mempengaruhinya	Indeks Entropy Theil	Terdapat ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Pertumbuhan penanaman modal asing mempunyai pengaruh negatif dan signifikan Pertumbuhan ekspor mempunyai pengaruh negatif dan signifikan Pertumbuhan Produk

			Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah tahun 2000 - 2004.
3.	Doni Mahardiki, Rokhedi Priyo Santoso Judul : Analisis perubahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia 2006 - 2011	Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil	Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kesenjangan Williamson ketimpangan PDRB per kapita antar provinsi di Indonesia selama periode 2006 – 2011 mencapai nilai 0,796. Secara umum nilai Indeks Kesenjangan Williamson mengalami kecenderungan meningkat. Kenaikan tingkat ketimpangan juga secara statistik signifikan. Sementara itu hasil perhitungan Indeks Kesenjangan Theil didapatkan rata - rata nilai Indeks Kesenjangan Theil pada tahun 2006 – 2011 sebesar 0,3513. Secara umum nilai Indeks Kesenjangan Theil mengalami kecenderungan meningkat di akhir periode.
4.	Andi Samsir, Abdul Rahman Judul : Menelusuri Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota	Regresi panel, Indeks wiliamsen	Selama periode penelitian 2010 - 2015, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson, sedangkan menurut Indeks entropi Theil, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. Sebagai akibatnya tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Kabupaten / kota Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan adanya kurva U terbalik.
5.	Bakhtiar Al Yunussy Subrata Judul : Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi	Logistic Regression	1. Pertumbuhan ekonomi dalam periode penelitian kecenderungan mengalami peningkatan sedangkan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan

	ketimpangan pendapatan kabupaten / kota di Jawa Timur		<p>gini rasio juga mengalami peningkatan, sehingga memiliki hubungan yang searah atau positif.</p> <p>2. Kualitas manusia yang digambarkan dengan IPM memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan saat terjadinya peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan akan membuat kualitas dari manusia jauh lebih baik terutama pada golongan miskin</p> <p>3. Pendapatan yang diterima masyarakat miskin yang digambarkan dengan peningkatan produktivitas pertanian memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan mayoritas yang bekerja di sektor pertanian adalah golongan masyarakat miskin.</p> <p>4. Aksesibilitas infrastruktur yang digambarkan dengan kondisi jalan baik, memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan semakin lancarnya mobilitas jalan akan membuat masyarakat golongan miskin lebih mudah dalam mengakses mobilitas barang dan jasa</p>
6.	<p>Muhammad Yulhelmy Isra</p> <p>Judul : Analysis of Factors That Influence the Interdiction of District / City in the Province North Sumatra</p>	Indeks wiliamsons	<p>1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan</p> <p>2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada</p>

			<p>ketimpangan pendapatan</p> <p>3. Jumlah orang miskin berpengaruh positif dan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan</p> <p>Pengeluaran pemerintah dalam pendidikan berpengaruh negatif dan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan</p> <p>4. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif dan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan</p>
7.	<p>Shita Tiara</p> <p>Judul : Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera utara</p>	<p>Indeks wiliamsen</p>	<p>1. Perkembangan ekonomi yang dilihat dari PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dilihat dari data tahun terakhir yang merupakan angka tertinggi sebesar 30 482590,52, adapun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera nilai PDRB per kapita selama tahun pengamatan juga mengalami peningkatan nilai PDRB yang tertinggi terdapat di Kota Medan dengan angka 53 623967,96.</p> <p>Ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang dilihat dari Gini Ratio selama tahun pengamatan berada di angka 0,35 yang artinya pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara relatif merata, dan nilai Gini Ratio tertinggi menurut kabupaten / kota selama tahun pengamatan terjadi di Samosir dengan angka 0,447</p>

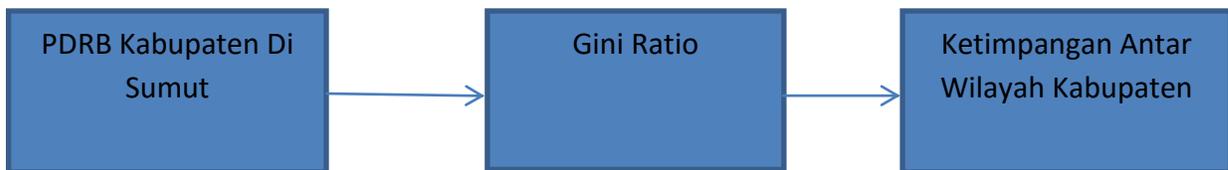
Keterbaruan penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya khususnya penelitian dari Shita Tiara dan Muhammad Yulhelmy Isra yang meneliti dengan wilayah yang sama yaitu penelitian yang dilakukan Shita Tiara hanya menggunakan satu variabel bebas yaitu PDRB, lalu dalam penelitian ini dilakukan pembaruan data dan tahun serta penambahan jumlah variabel. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yulhelmy Isra menggunakan variabel bebas yang sama salah satunya yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, namun tahun yang digunakan dalam penelitian lebih terbaru. Pada penelitian Muhammad Yulhelmy Isra penelitian dengan variabel yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dipengaruhi oleh data dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yulhelmy Isra awal penelitian dilakukan saat pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara masih diatas 6 persen, dan dalam penelitian ini awal tahun yang digunakan yaitu saat pertumbuhan ekonomi melambat dengan signifikan. Tahun awal yang digunakan dalam penelitian ini pada saat pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara sedang memburuk, beberapa faktor diantaranya yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara yaitu permintaan akan hasil perkebunan dan tanaman pangan yang berkurang, perlambatan sektor perdagangan dan kenaikan suku bunga kredit serta melemahnya nilai tukar juga berkontribusi dalam penurunan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Komoditas ekspor unggulan Sumatera Utara seperti kopi, karet dan

sawit terus mengalami penurunan harga ini disebabkan oleh negara tujuan yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.

### 2.3 Kerangka Konseptual

**Gambar II.2**

#### **Kerangka Konseptual**



### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan yang telah dilakukan maka diduga terdapat ketimpangan pendapatan antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.